



Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Perilaku Memilih Petahana dalam Pemilihan Walikota Palangka Raya 2024

Anyualatha Haridison¹, Bismar Harris Satriawan^{2*}, Christian Bernard³, Jhon Retei Alfri Sandi⁴, Imanuel Jaya⁵

¹⁻⁵Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: satriawanhb@fisip.upr.ac.id

Abstract. *Social assistance programs are often a major concern during local elections. However, their impact on voter support for incumbents remains underexplored. This study analyzes how perceptions of social assistance influence voting behavior for incumbents in the 2024 Palangka Raya mayoral election. Using a sequential explanatory mixed methods design, the quantitative stage was conducted through a survey of 370 social assistance recipients and analyzed using PLS-SEM. The qualitative stage used 13 official documents and verified news reports to examine how social assistance was framed in the public sphere. The results show that perceptions of social assistance are the strongest predictor of the tendency to vote for incumbents, whereas political competition, demographic factors, and moderating effects are not significant. Qualitative analysis shows that social assistance issues are the most frequently mentioned theme in news reports and official documents, thereby reinforcing their relevance as a basis for evaluation by the beneficiaries. This study shows that voters tend to respond to the benefits of policies they perceive in determining their electoral choices, even within a public sphere that frequently raises issues of program politicization.*

Keywords: 2024 Palangka Raya Mayoral Election; PLS-SEM; Politics and Polarization; Social Assistance; Voter Support

Abstrak. Program bantuan sosial sering menjadi perhatian utama dalam pemilihan lokal, tetapi dampaknya terhadap dukungan pemilih terhadap petahana belum banyak diteliti. Penelitian ini menganalisis bagaimana persepsi terhadap bantuan sosial memengaruhi perilaku memilih petahana pada Pilkada Kota Palangka Raya 2024. Menggunakan desain *mixed methods sequential explanatory*, tahap kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 370 penerima bantuan sosial dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Tahap kualitatif menggunakan 13 dokumen resmi dan pemberitaan terverifikasi untuk melihat bagaimana isu bantuan sosial dibingkai dalam ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial merupakan prediktor paling kuat yang menjelaskan kecenderungan memilih petahana, sementara kompetisi politik, faktor demografis, dan efek moderasi tidak signifikan. Analisis kualitatif memperlihatkan bahwa isu bantuan sosial menjadi tema yang paling sering muncul dalam pemberitaan dan dokumen resmi, sehingga memperkuat relevansinya sebagai dasar evaluasi bagi penerima manfaat. Studi ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung merespons manfaat kebijakan yang mereka rasakan dalam menentukan pilihan elektoral, meskipun dalam ruang publik isu politisasi program kerap muncul.

Kata kunci: Bantuan sosial; Dukungan pemilih; Pilkada Kota Palangka Raya 2024; PLS-SEM; Politik dan Polarisasi

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan arena krusial dalam konsolidasi demokrasi lokal dan menjadi ruang kompetisi yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja dan akuntabilitas kandidat (Haridison et al., 2021). Dalam Pilkada Kota Palangka Raya 2024, kembalinya kandidat petahana menegaskan perlunya menelaah determinan yang membentuk perilaku memilih masyarakat, terutama karena meningkatnya atensi terhadap distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan. Bansos yang secara normatif ditujukan sebagai instrumen proteksi sosial sering kali dipersepsikan secara politis oleh masyarakat, sehingga batas antara kebijakan kesejahteraan dan strategi elektoral dapat menjadi kabur ketika distribusi bantuan terjadi berdekatan dengan momentum pemilihan (Achmad, 2024; Dharma et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa program bantuan sosial dapat memainkan peran strategis dalam kompetisi elektoral. Barrientos (2023) menunjukkan bahwa bansos dapat berfungsi sebagai instrumen *policy exchange* yang ditukar dengan dukungan pemilih, atau sebagai sarana *political inclusion* yang memperkuat keterikatan politik kelompok marjinal. Studi terhadap Bolsa Família di Brasil (Pinto et al., 2023) juga menunjukkan bahwa politisasi bantuan sosial dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah pemilihan, di mana wilayah yang loyal kepada petahana menerima alokasi bantuan yang lebih besar. Temuan serupa juga muncul di Indonesia. Mobilisasi bansos secara masif pada periode Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dikaitkan dengan lonjakan partisipasi pemilih dan indikasi penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan elektoral (BAWASLU Kabupaten Tuban, 2024; Laode Harjudin et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis empiris pada konteks sub-nasional seperti kota Palangka Raya. Dengan jumlah penerima bantuan sosial yang cukup signifikan, maka persepsi masyarakat terkhususnya penerima bantuan sosial terhadap kebijakan bantuan sosial sangat mungkin mempengaruhi pilihan elektoral, terutama terhadap kandidat petahana yang diasosiasikan dengan kebijakan distribusi bantuan sosial. Selain itu, intensitas kompetisi elektoral antar kecamatan dan juga karakteristik demografis pemilih seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpotensi sebagai variabel kontrol hubungan antara persepsi terhadap kebijakan bantuan sosial dan perilaku pemilih.

Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi masyarakat terkait bantuan sosial terhadap kecenderungan memilih kandidat petahana pada Pilkada Kota Palangka Raya tahun 2024, serta menguji peran variabel moderasi dari intensitas politik lokal dan karakteristik demografis. Penggunaan *mixed method sequential explanatory* memungkinkan integrasi antara temuan kuantitatif dan penjelasan yang lebih dalam dari perspektif kualitatif, sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana suatu kebijakan redistributif diartikulasikan ke dalam perilaku politik pemilih Palangka Raya.

2. KAJIAN TEORITIS

Bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan yang secara umum ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial (Danquah & Ouattara, 2023; Hickey et al., 2015; Yörük & Gençer, 2021). Namun dalam konteks politik elektoral, bansos sering kali mengalami politisasi ketika elite politik memanfaatkannya untuk menggalang dukungan atau mengonsolidasi basis politik (Fossati, 2025; Pellissery & Barrientos, 2013; Shim, 2022; Tillin & Duckett, 2017).

Dua landasan teoretis utama dalam penelitian ini menjelaskan hubungan tersebut. Pertama, *policy exchange* yang memandang bansos sebagai komoditas politik yang dapat ditukar dengan dukungan pemilih (Tillin & Duckett, 2017). Dalam kerangka ini, hubungan antara elite dan pemilih bersifat transaksional dan sering berjalan melalui mekanisme patronase atau klientelisme (Barrientos, 2023; Hicken et al., 2022; Hickey et al., 2015; Pellissery & Barrientos, 2013). Kedua, *political inclusion* yang menekankan bahwa bansos berfungsi sebagai sarana peningkatan partisipasi politik, di mana penerima bantuan merasa lebih terhubung dengan institusi publik (Barrientos, 2023). Namun, batas antara kedua pendekatan ini tidak selalu jelas, sehingga praktik politisasi bansos dapat berlangsung secara simultan sebagai pertukaran politik sekaligus sebagai upaya membangun legitimasi pemerintah (Layton & Smith, 2015; Shim, 2022; Tanjung, 2020).

Dalam kasus Indonesia, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bansos seringkali digunakan oleh elite politik lokal sebagai bagian dari strategi elektoral (Nishizaki, 2023; Sobari, 2023a). Distribusi kebijakan sosial kerap kali melibatkan jaringan klientelistik informal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, atau patron lokal yang memperkuat dukungan dan loyalitas pemilih melalui hubungan sosial dan ekonomi yang berulang (Berenschot & Aspinall, 2020; Bernard, 2025; Fossati et al., 2020; Kelihu, 2022; Sobari, 2023b). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa suatu kebijakan bantuan sosial tidak cukup jika hanya diterima sebagai kebijakan publik, namun juga dipersepsikan melalui kacamata relasi kekuasaan (*power relation*) dan persaingan elektoral (*electoral competition*).

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu di isi, terutama mengenai bagaimana persepsi individu terkhususnya penerima bantuan sosial terhadap kebijakan bantuan sosial beroperasi sebagai mekanisme yang membentuk preferensi politik pemilih. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemilih dapat memaknai bantuan sosial sebagai hak, sebagai bentuk gratifikasi politik, atau sebagai bentuk kepedulian pemerintah (Fossati, 2025; Kusworo & Anggraini, 2024; Papava & Katsadze, 2025; Satriawan & Angela, 2024; Tanjung, 2020).

Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menguji bagaimana persepsi terhadap suatu kebijakan tersebut mempengaruhi pilihan terhadap kandidat petahana, terutama dalam *setting* pemilihan level sub-nasional seperti kota Palangka Raya. Selain itu, peran dari dinamika politik lokal seperti intensitas kompetisi politik antar wilayah dan juga heterogenitas demografis pemilih masih kurang dieksplorasi sebagai variabel moderasi dan kontrol yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi kebijakan bantuan sosial terhadap perilaku pemilih.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka analisis yang dibangun dari landasan teoretis di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi terhadap bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku memilih petahana.

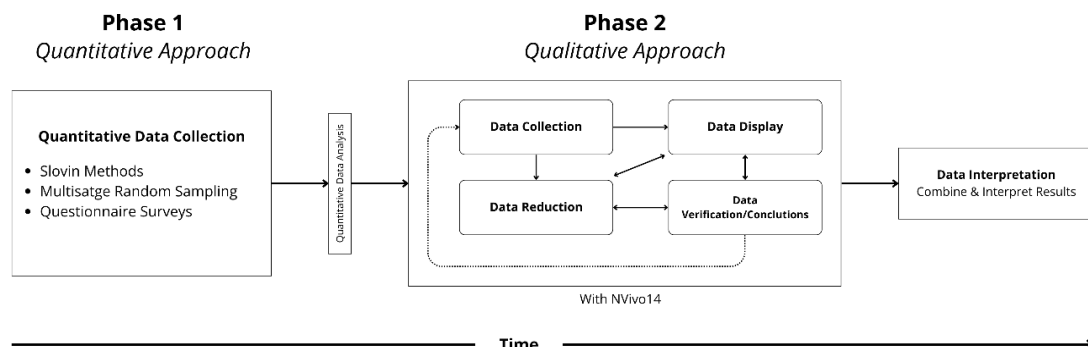
H2: Intensitas kompetisi politik berpengaruh terhadap perilaku memilih petahana.

H3: Intensitas kompetisi politik memoderasi pengaruh persepsi terhadap bantuan sosial terhadap perilaku memilih petahana.

H4: Karakteristik demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan) berpengaruh terhadap perilaku memilih petahana.

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), yang memungkinkan analisis terhadap pengaruh langsung, efek moderasi, serta kontribusi variabel kontrol demografis terhadap perilaku memilih petahana.

3. METODE PENELITIAN



Gambar 1. *Mixed Method Sequential Explanatory Design*

Sumber: diolah Peneliti (2025) diadopsi dari (Creswell & Creswell, 2018; Satriawan et al., 2024)

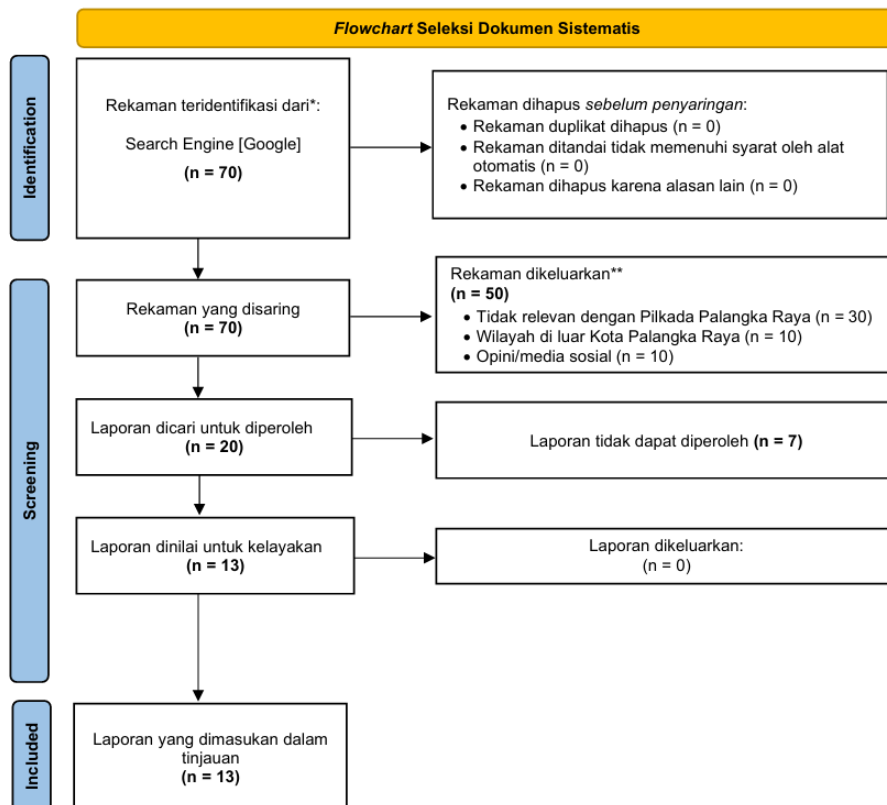
Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods* dengan desain *Sequential Explanatory* (Creswell & Creswell, 2018; Hirose & Creswell, 2023). Tahap kuantitatif dilakukan terlebih dahulu untuk menguji hubungan antara persepsi terhadap bantuan sosial, intensitas kompetisi politik, dan perilaku memilih petahana. Tahap kualitatif kemudian digunakan untuk memperjelas dan menafsirkan temuan statistik dengan membaca bagaimana isu bansos dan petahana dibingkai dalam wacana publik.

Tahap kuantitatif dilaksanakan di Kota Palangka Raya yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan karakteristik sosial dan dinamika kompetisi yang berbeda. Populasi terdiri

dari 4.575 penerima bantuan sosial non-tunai (PASADA, 2024), yaitu kelompok yang paling relevan dengan fokus penelitian. Teknik *stratified random sampling* digunakan agar representasi sampel mencerminkan sebaran penerima bansos di setiap kecamatan. Berdasarkan perhitungan Slovin dengan *Margin of error* 5% (0.05), jumlah sampel ditetapkan sebanyak 370 responden ($N= 370$). Survei mengukur persepsi terhadap distribusi bansos, pilihan terhadap kandidat petahana, intensitas kompetisi politik, serta karakteristik demografis sebagai variabel kontrol.

$$N = \frac{4575}{1 + 4575 \times 0.05^2} = \frac{4575}{1 + 4575 \times 0.0025} = \frac{4575}{1 + 11,437} = \frac{4575}{12,437} = 366,79 \approx 370$$

Tahap kualitatif dilakukan melalui analisis sentimen dan analisis tematik terhadap 13 dokumen yang dikumpulkan melalui seleksi secara sistematis. Dokumen tersebut berasal dari portal berita online terverifikasi, pernyataan resmi KPU dan Bawaslu, putusan MK, serta laman Pemerintah Kota Palangka Raya. Seluruhnya dipilih karena berkaitan langsung dengan Pilkada Kota Palangka Raya 2024, terutama dengan kata kunci bantuan sosial. Analisis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana publik dan institusi membingkai bantuan sosial, apakah sebagai kebijakan kesejahteraan, alat politik, atau sumber legitimasi politik.



Gambar 2. *Flowchart Seleksi Dokumen*

Sumber: diolah Peneliti (2025) diadopsi dari PRISMA flow diagram

Data kuantitatif dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi sesuai model penelitian. Metode ini sesuai untuk konstruk laten yang diukur dengan skala ordinal dan memungkinkan analisis hubungan yang kompleks secara simultan. Sementara itu, analisis tematik dan sentimen digunakan untuk menafsirkan pola kuantitatif melalui pemetaan isu, kecenderungan pemberitaan, serta narasi publik yang berkembang selama kontestasi.

Model penelitian memposisikan persepsi terhadap bantuan sosial sebagai prediktor utama perilaku memilih petahana, dengan intensitas kompetisi politik sebagai moderator, dan variabel demografis sebagai kontrol. Dengan memadukan dua jenis analisis yakni survei yang menangkap persepsi individu dan dokumen yang menampilkan wacana publik penelitian ini membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana bantuan sosial dipandang dan berdampak pada perilaku elektoral dalam Pilkada Kota Palangka Raya 2024.

Batasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan survei pasca pemilihan, sehingga temuan berpotensi dipengaruhi bias ingatan (*recall bias*) mitigasi dilakukan melalui desain anonim dan fokus pada persepsi kebijakan. Isu bantuan sosial juga sensitif dan dapat memunculkan *social desirability bias* dimana responden cenderung memilih jawaban aman yang dapat diterima secara sosial, yang dimitigasi dengan penghapusan identitas personal dan penegasan kerahasiaan jawaban dalam kuisioner.

Pendekatan kualitatif berbasis dokumen memiliki keterbatasan dalam menangkap motivasi individu dan rentan terhadap *selection bias*, meskipun kriteria inklusi-eksklusi serta verifikasi manual telah diterapkan untuk meningkatkan reliabilitas data. Selain itu, dokumen yang dianalisis berasal dari periode pasca pemilu (*post election*), sehingga wacananya kemungkinan dipengaruhi *contextual bias* terkait sengketa elektoral. Model penelitian juga tidak memasukkan variabel alternatif yang mungkin relevan. Dengan mempertimbangkan batasan tersebut, interpretasi temuan dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kuantitatif

Profil Demografi Responden

Survei dilakukan terhadap 370 penerima bantuan sosial yang tersebar di lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Mayoritas responden berada pada kelompok usia 17–26 tahun dan 27–36 tahun, masing-masing sebesar 30,81%, menunjukkan dominasi pemilih muda yang relatif aktif dalam dinamika politik lokal. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (60,27%) dan memiliki pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 55,41%.

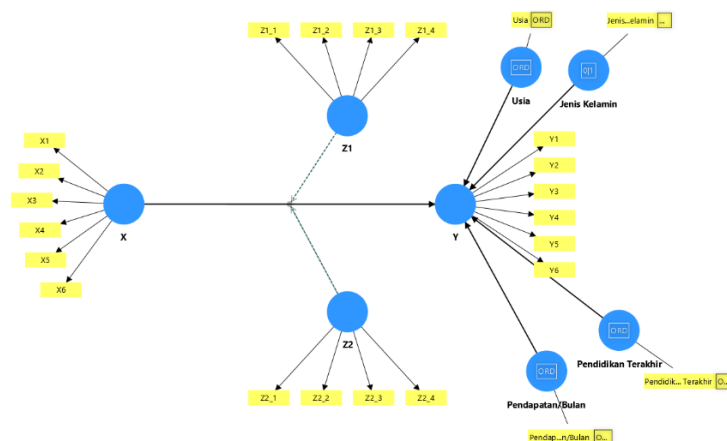
Dari sisi ekonomi, mayoritas berpenghasilan antara 1–2 juta rupiah per bulan, menggambarkan karakteristik penerima bansos yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hampir seluruh responden (89,46%) menyatakan menerima bansos dalam satu tahun terakhir, dan tingkat partisipasi pemilih juga tinggi (89,19%). Gambaran ini menegaskan relevansi kelompok responden sebagai populasi yang sensitif terhadap dinamika bantuan sosial dalam pemilihan kepala daerah kota Palangka Raya 2024.

Assessment Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator konstruk memiliki *outer loading* di atas 0,70, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Reliabilitas konstruk juga sangat baik, dengan nilai *Composite Reliability* berkisar antara 0,925–0,958 dan AVE antara 0,749–0,820. Validitas diskriminan terpenuhi melalui kriteria Fornell–Larcker dan HTMT, yang menunjukkan bahwa semua konstruk mengukur konsep yang berbeda secara tepat.

Tidak terdapat masalah multikolinearitas, karena seluruh nilai VIF < 5. Dengan demikian, model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel untuk dilanjutkan ke tahap analisis struktural.

Assessment Model Struktural (Inner Model)



Gambar 3. Model Struktural

Sumber: diolah Peneliti (2025) melalui Smart PLS 4

Model struktural menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial (X) merupakan prediktor paling kuat dan signifikan terhadap perilaku memilih petahana (Y). Paparan informasi politik (Z1) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan, meskipun dengan efek yang lebih kecil. Sebaliknya, intensitas kompetisi politik (Z2) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih, dan tidak pula memoderasi hubungan antara persepsi bansos dan pilihan elektoral. Variabel kontrol demografis (usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin) tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

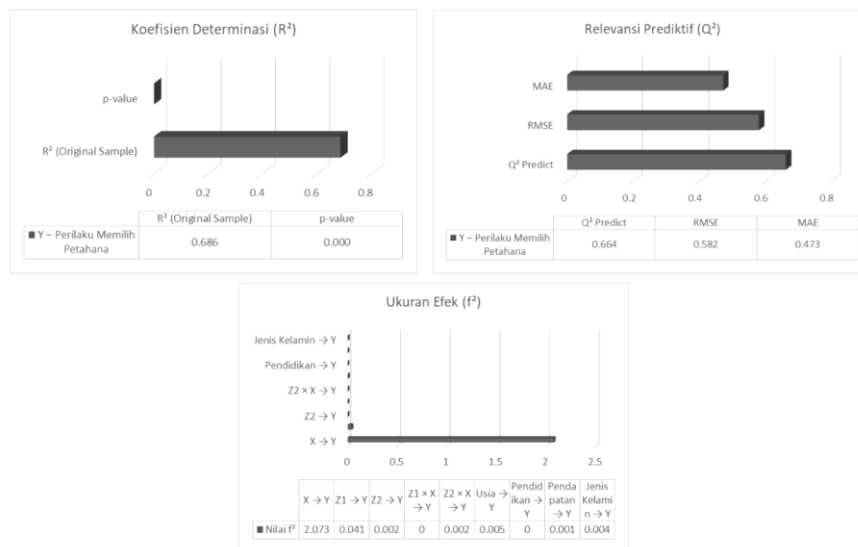
Tabel 1. Hasil Koefisien Jalur dan Nilai Signifikansi

Jalur Hubungan	Koefisien (β)	t-statistic	p-value	Keterangan
X $\rightarrow$ Y (Persepsi Bansos $\rightarrow$ Perilaku Memilih Petahana)	0.820	44.867	0.000	Signifikan (+)
Z1 $\rightarrow$ Y (Paparan Informasi Politik $\rightarrow$ Perilaku Memilih Petahana)	0.115	3.013	0.003	Signifikan (+)
Z2 $\rightarrow$ Y (Intensitas Kompetisi Politik $\rightarrow$ Perilaku Memilih Petahana)	0.023	0.669	0.504	Tidak signifikan
Z1 $\times$ X $\rightarrow$ Y (Moderasi Paparan Informasi Politik)	-0.003	0.133	0.894	Tidak signifikan
Z2 $\times$ X $\rightarrow$ Y (Moderasi Kompetisi Politik)	0.026	0.886	0.376	Tidak signifikan
Usia $\rightarrow$ Y	-0.04	1.348	0.178	Tidak signifikan
Pendidikan $\rightarrow$ Y	0.003	0.083	0.934	Tidak signifikan
Pendapatan $\rightarrow$ Y	0.014	0.455	0.649	Tidak signifikan
Jenis Kelamin $\rightarrow$ Y	0.073	1.219	0.223	Tidak signifikan

Berdasarkan hasil koefisien jalur dan nilai signifikansinya, status masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

- H1 diterima, karena persepsi terhadap bantuan sosial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku memilih petahana ($p < 0.001$).
- H2 ditolak, karena intensitas kompetisi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih ($p = 0.504$).
- H3 ditolak, karena interaksi antara persepsi bantuan sosial dan intensitas kompetisi politik tidak signifikan sehingga tidak terbukti sebagai efek moderasi ($p = 0.376$).
- H4 ditolak, karena variabel demografis (usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih ($p > 0.05$).

Kekuatan Prediktif Model



Gambar 4. Grafik Kekuatan Prediktif, Relevansi Prediktif dan Ukuran Efek

Model menunjukkan kemampuan prediktif yang kuat dengan nilai R^2 sebesar 0.686, yang berarti 68,6% variasi perilaku memilih petahana dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Nilai Q^2 sebesar 0.664 menunjukkan relevansi prediktif yang tinggi, dengan tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Ukuran efek (f^2) menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial memberikan kontribusi terbesar terhadap perilaku memilih ($f^2 = 2.073$), sementara paparan informasi politik memiliki efek kecil dan variabel lain berpengaruh sangat kecil atau tidak signifikan.

Ringkasan Temuan Kuantitatif

Secara keseluruhan, hasil kuantitatif menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial (X) merupakan faktor paling dominan yang membentuk perilaku memilih petahana (Y), diikuti oleh paparan informasi politik (Z1) meskipun dengan efek kecil. Intensitas kompetisi politik, efek moderasi, dan variabel demografis tidak memberikan pengaruh signifikan. Model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang kuat, menandakan bahwa persepsi terhadap kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu determinan utama dalam perilaku elektoral pemilih kalangan penerima bansos di Kota Palangka Raya.

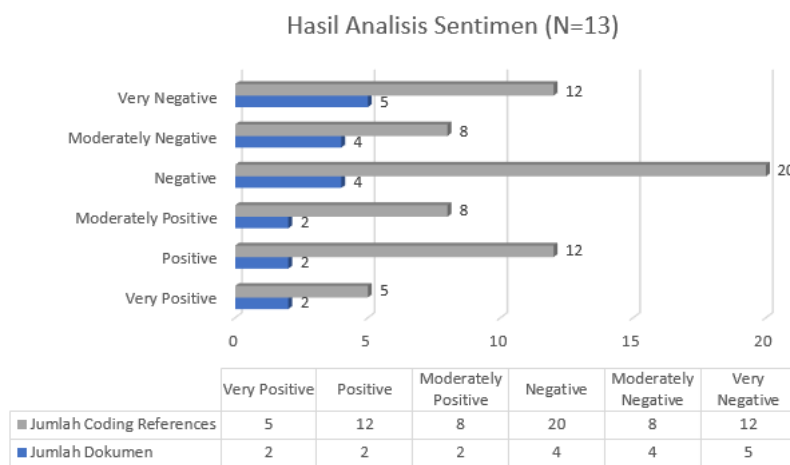
Hasil Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk memperjelas konteks sosial-politik yang melingkupi temuan kuantitatif, khususnya mengenai bagaimana bantuan sosial dibingkai dan diperdebatkan dalam ruang publik selama dan setelah Pilkada Kota Palangka Raya 2024. Tujuan tahap ini bukan mengidentifikasi motivasi pemilih secara langsung, melainkan memetakan bagaimana isu bansos dikonstruksi dalam pemberitaan dan dokumen resmi,

sehingga memberikan gambaran tentang lingkungan informasi yang memengaruhi persepsi masyarakat.

Analisis Sentimen

Sebanyak 13 dokumen (N = 13) yang bersumber dari media online terverifikasi, lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, MK) dan laman resmi pemerintah kota Palangka Raya dianalisis menggunakan *Auto Code Sentiment Analysis* dalam NVivo 14 dan diverifikasi kembali melalui peninjauan secara manual. Dokumen-dokumen tersebut terbit antara November 2024 hingga Februari 2025, yaitu periode ketika isu bantuan sosial menonjol dalam kampanye, penetapan hasil pemilihan, dan sengketa PHPU.



Gambar 5. Hasil Analisis Sentimen menggunakan Nvivo 14

Analisis 13 dokumen menunjukkan bahwa kategori sentimen negatif muncul lebih banyak dibandingkan kategori lainnya. Namun, proporsi ini tidak dapat dibaca sebagai evaluasi terhadap kandidat atau pihak tertentu, melainkan sebagai konsekuensi dari karakter linguistik dokumen yang memuat istilah-istilah bernada negatif, seperti “tuduhan,” “*money politics*,” “pemeriksaan,” “tidak terbukti,” atau “klarifikasi.”

Dalam dokumen resmi maupun pemberitaan, istilah-istilah tersebut digunakan dalam penyampaian keberatan, tanggapan, dan proses argumentasi yang bersifat prosedural. Secara otomatis, perangkat analisis sentimen NVivo mengelompokkan kata-kata tersebut sebagai negatif tanpa mempertimbangkan konteks substantifnya. Oleh karena itu, dominasi sentimen negatif lebih mencerminkan sifat bahasa dalam dokumen perselisihan, bukan arah keberpihakan atau penilaian substantif terhadap pihak mana pun.

Analisis Tematik

Analisis tematik dilakukan terhadap 13 dokumen yang sama dengan analisis sentimen, menggunakan proses *coding* awal, pengelompokan kategori, dan pembentukan tema substantif di NVivo 14. Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi pola wacana yang konsisten terkait isu bantuan sosial dalam Pilkada Kota Palangka Raya 2024, sekaligus memberikan konteks interpretatif terhadap temuan kuantitatif. Tiga tema utama berhasil diidentifikasi: (1) dugaan politisasi bantuan sosial, (2) respons resmi lembaga negara, dan (3) tuduhan & klarifikasi terkait proses sengketa.

Pertama, yaitu pemberitaan media banyak membahas dugaan politisasi bantuan sosial, terutama terkait pembagian barang dan penyaluran hibah. Nada kritis yang muncul lebih menggambarkan liputan media terhadap isu sengketa, bukan penilaian terhadap pemilih atau kandidat.

Kedua, yaitu dokumen resmi dari pemerintah, KPU, dan Bawaslu berisi penjelasan prosedur dan dasar hukum penyaluran bantuan. Dokumen ini cenderung bernada netral karena berfokus pada klarifikasi administratif, bukan pada polemik politik.

Ketiga, dokumen terkait proses PPHU memuat argumentasi para pihak dan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dugaan politisasi bantuan sosial tidak terbukti secara hukum. Nada negatif dalam tema ini terutama berasal dari bahasa pemeriksaan perkara, bukan dari penilaian terhadap aktor tertentu.

Secara keseluruhan, ketiga tema ini menunjukkan bahwa isu bantuan sosial memang muncul dalam ruang informasi publik, tetapi nada pemberitaan dipengaruhi oleh karakter dokumennya. Temuan ini sejalan dengan analisis sentimen dan membantu menjelaskan konteks isu, tanpa menarik kesimpulan langsung mengenai perilaku pemilih.

Integrasi Temuan Kuantitatif & Kualitatif

Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial menjadi faktor yang paling kuat membentuk kecenderungan memilih petahana, sementara kompetisi politik dan karakteristik demografis tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Analisis kualitatif kemudian menunjukkan bahwa isu bantuan sosial memang banyak muncul dalam pemberitaan dan dokumen resmi selama proses pemilihan, meskipun variasi nada yang muncul terutama dipengaruhi oleh sifat dokumen tersebut baik dari liputan media yang menyoroti polemik, maupun klarifikasi administratif dari lembaga negara.

Kedua temuan ini saling melengkapi karena bekerja pada level yang berbeda. Analisis kuantitatif menggambarkan pola persepsi individu, sedangkan analisis kualitatif memberikan gambaran mengenai bagaimana isu bantuan sosial dibingkai dalam ruang informasi publik.

Dengan demikian, integrasi keduanya membantu memperjelas konteks mengapa bantuan sosial menjadi isu yang menonjol dalam persepsi pemilih, tanpa mengaitkan secara langsung dinamika pemberitaan sebagai penentu pilihan elektoral.

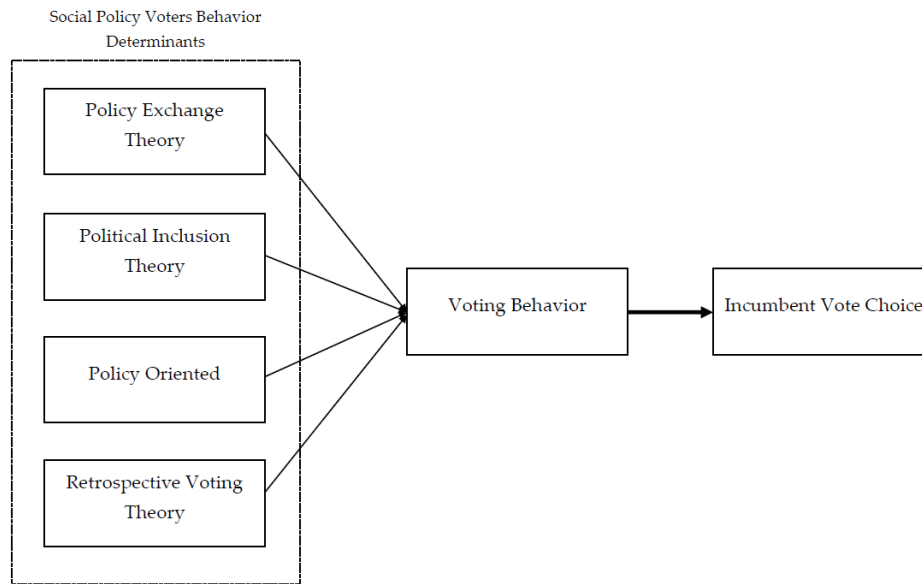
Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial merupakan faktor yang paling kuat memengaruhi kecenderungan memilih petahana di kalangan penerima bansos. Pola ini sejalan dengan kerangka *retrospective voting*, yang menjelaskan bahwa pemilih cenderung menilai kandidat berdasarkan manfaat kebijakan yang telah mereka rasakan (Fiorina, 1981; Key & Cummings, 1966). Karena bansos adalah bentuk kebijakan publik yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, penerima manfaat memiliki dasar evaluasi yang lebih konkret terhadap pemerintah kota.

Pengaruh kuat bansos juga dapat dipahami melalui kerangka *policy exchange theory* dan *distributive politics* yang menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan manfaat material sering dipersepsi sebagai tanda responsivitas pemerintah (Hermawan & Kurniawan, 2019; Stokes, 2005). Dalam penelitian ini, hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat transaksional, melainkan bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap relevan oleh penerimanya. Sehingga, bansos menjadi referensi kebijakan yang paling mudah diingat dan dinilai oleh kelompok penerima manfaat.

Temuan juga menunjukkan adanya kecenderungan *policy-oriented voters* dalam kelompok responden. Studi terdahulu menjelaskan bahwa pemilih sering menggunakan informasi kebijakan ketika mereka memiliki pengalaman langsung terhadap layanan publik (Klingelhöfer, 2021; Lau & Redlawsk, 2006). Karena seluruh responden merupakan penerima bansos, evaluasi mereka terhadap program tersebut memiliki bobot lebih besar dibandingkan faktor kompetisi politik atau karakteristik sosial demografis.

Tidak ditemukannya perbedaan signifikan antar kelompok sosial dalam model kuantitatif dapat dipahami melalui perspektif *political inclusion theory*. Ketika manfaat kebijakan diterima secara relatif merata dalam kelompok penerima bansos, evaluasi terhadap pemerintah cenderung homogen (Barrientos, 2023; Weitz-Shapiro, 2014). Namun, penting untuk menekankan bahwa temuan ini hanya mencerminkan pola dalam subpopulasi penerima bansos dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pemilih.



Gambar 6. *Framework Teoretis Penelitian*

Sumber: diolah peneliti (2025)

Analisis kualitatif menunjukkan bahwa bantuan sosial merupakan isu yang paling menonjol dalam ruang informasi publik selama Pilkada, sebagaimana terlihat dalam pemberitaan dan dokumen resmi. Meskipun tidak menggambarkan motivasi pemilih secara langsung, intensitas sorotan menunjukkan bahwa bansos merupakan kebijakan yang secara struktural mudah dikaitkan serta menjadi bagian dari dinamika elektoral. Bagi responden yang merupakan penerima bantuan, kombinasi antara pengalaman langsung serta tingginya eksposur isu ini di ruang publik selaras dengan temuan kuantitatif, di mana persepsi terhadap bansos muncul sebagai faktor kuat dalam perilaku memilih petahana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih di kalangan penerima bansos terutama dibentuk oleh bagaimana mereka menilai manfaat kebijakan yang sudah mereka rasakan (*retrospective*). Sementara itu, analisis wacana menunjukkan bahwa bansos juga menjadi fokus utama informasi publik selama pemilihan. Kedua temuan ini saling melengkapi, pengalaman langsung memberikan dasar evaluasi, sedangkan sorotan publik yang tinggi menandakan konteks di mana evaluasi tersebut terjadi. Hal ini konsisten dengan interpretasi mengapa persepsi terhadap bansos menjadi prediktor yang kuat bagi dukungan kepada petahana dalam penelitian ini, dibandingkan faktor persaingan politik atau demografis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi penerima bansos, persepsi terhadap bantuan sosial menjadi prediktor terkuat dalam kecenderungan memilih petahana pada Pilkada Kota Palangka Raya 2024. Temuan ini menguatkan bahwa penilaian pemilih lebih didasarkan pada manfaat kebijakan yang mereka rasakan langsung. Sementara itu, intensitas kompetisi politik dan karakteristik demografis tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Analisis kualitatif memperlihatkan bahwa bantuan sosial merupakan isu yang paling terlihat dalam ruang informasi publik pada masa pemilihan, sehingga memperkuat relevansinya sebagai acuan evaluatif bagi penerima manfaat. Meskipun isu politisasi kerap mengemuka dalam pemberitaan, temuan penelitian tetap konsisten. Dukungan terhadap petahana dalam kelompok ini terutama dibentuk oleh kombinasi antara manfaat kebijakan yang dirasakan dan tingginya eksposur isu tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kerangka *retrospective voting* dan *policy-oriented voting*, serta memberi kontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana evaluasi retrospektif penerima terhadap manfaat kebijakan sosial membentuk preferensi politik mereka. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memastikan tata kelola bansos yang transparan dan bebas dari potensi politisasi, sementara penyelenggara pemilu perlu memperkuat pengawasan distribusi bantuan pada masa kontestasi elektoral.

Penelitian ini memiliki batasan, termasuk potensi *recall bias* dan *social desirability bias* karena pengumpulan data kuantitatif dilakukan pasca pemilihan, serta keterbatasan analisis kualitatif yang bergantung pada dokumen sekunder dan rentan terhadap *selection* serta *contextual bias*. Mengingat sampel penelitian terbatas pada penerima bansos, temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh pemilih.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel di luar kelompok penerima bantuan, menggunakan desain longitudinal untuk menangkap perubahan persepsi sebelum dan sesudah pemilu, serta menambahkan variabel lain seperti kualitas layanan publik atau kredibilitas kandidat. Pengembangan analisis wacana media juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana isu kebijakan sosial dibingkai dalam konteks elektoral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya atas dukungan pendanaan, fasilitasi, dan pendampingan yang memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengisian survei serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam proses penelitian ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan berbagai pihak tersebut sangat berarti bagi kelancaran dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, W. (2024). Politics and social welfare: Dynamics of social assistance programs on electability in Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 205. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>
- Barrientos, A. (2023). Social assistance expansion and political inclusion in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 15(1), 25–46. <https://doi.org/10.1177/1866802X221143141>
- BAWASLU Kabupaten Tuban. (2024, October 2). Konferensi pers Bawaslu Tuban sampaikan hasil dugaan pidana bansos dan netralitas perangkat desa Bawaslu.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: Comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Bernard, C. (2025). Political marketing dan preferensi politik pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Palangka Raya tahun 2024. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26851.46888/1>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Danquah, M., & Ouattara, B. (2023). Aid and social cohesion. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 87, 118–131. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.11.008>
- Dharma, F., Syakhroza, A., & Martani, D. (2022). Does the social assistance budget realization affect incumbents' votes? (Study in Indonesia local election). *International Journal of Professional Business Review*, 7(6). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i6.636>
- Fiorina, M. P. (1981). *Retrospective voting in American national elections*. Yale University Press.
- Fossati, D. (2025). What drives voting behavior in Southeast Asia? Evidence from candidate choice experiments in five countries. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034251334253>

- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- Haridison, A., Sandi, J. R. A., Suprayitno, S., & Jaya, I. (2021). Regional election and COVID-19: Evidence in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI)-Journal: Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1597–1606. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1821>
- Hermawan, D., & Kurniawan, R. C. (2019). Distributive politics and manipulative policy in local election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(2), 180–190. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.19122>
- Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. *World Politics*, 74(1), 77–120. <https://doi.org/10.1017/S0043887121000216>
- Hickey, S., Sen, K., & Bukenya, B. (2015). *The politics of inclusive development*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/27629>
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying core quality criteria of mixed methods research to an empirical study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12–28. <https://doi.org/10.1177/15586898221086346>
- Kelihu, A. (2022). Political clientelism, family power and conflict permanence in local elections: The case of Maluku. *PCD Journal*, 10(1).
- Key, V. O., & Cummings, M. C. (1966). *The responsible electorate: Rationality in presidential voting, 1936-1960*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Klingelhöfer, J. (2021). Competitive elections, incumbency advantage, and accountability. *Economic Theory*, 71(4), 1397–1428. <https://doi.org/10.1007/s00199-021-01370-9>
- Kusworo, D. L., & Anggraini, T. (2024). Political corruption: Rise of social aid politicization by government in grassroots campaign 2024 elections. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 11(2), 152–168.